

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BERBASIS SAK ETAP DAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 BAGI UMKM

Nana Nofianti¹⁾, Windu Mulyasari¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : nnofianti@gmail.com

Abstract

The purpose of this activity is to provide training on financial reporting and tax calculation for SMEs. Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in need of bookkeeping and accounting skills are easy to apply in order to prepare financial statements in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) ETAP 2011 and can carry out tax obligations to the State in accordance with Regulation 46 of 2013.

Problems faced by SMEs is required to prepare financial statements and conduct of tax obligations. While SMEs are not or less capable of making financial statements and therefore can not know the financial position, financial performance, owners' equity in the past and carry out tax obligations. To facilitate SMEs in financial reporting and tax calculation, it takes a simple bookkeeping accounting standards based on the current and the calculation of tax for SMEs.

Partners in community service activities are the SMEs in Serang. The method of this activity by providing training in financial reporting and tax calculations.

Keywords: SMEs, Financial Statements, Taxation

1. PENDAHULUAN

Data BPS tahun 2015 menyebutkan bahwa jumlah usaha mikro di Kota Cilegon adalah 67.527, usaha kecil 12.572, dan usaha menengah 599. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi sebagai bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pelaku usaha, serta penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Dalam sistem keuangan umumnya pengelola UMKM tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai.

Pengelola UMKM tidak atau belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengelola UMKM secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi pelaku UMKM adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi. Dampak dari kurangnya kesadaran pengusaha UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi ini diantaranya adalah:

1. Tidak diketahui berapa harga pokok secara tepat.
2. Tidak diketahui berapa laba yang dihasilkan dari usaha.
3. Terdapat manajemen kas yang buruk sehingga mengalami kesulitan modal kerja.

4. Tidak tercatatnya utang dan piutang secara tepat.
5. Diragukannya reliabilitas dari informasi yang dimiliki UMKM.

Pada kenyataannya pula, praktek kegiatan UMKM selalu berjalan tanpa mengandalkan informasi keuangan yang disusun secara tertib dan teratur. Banyak UMKM yang dapat berjalan normal tanpa dukungan informasi keuangan yang memadai. Banyak yang beranggapan bila kegiatan penyusunan laporan keuangan, masih dianggap mewah dan belum sebanding dengan kegunaannya, dampaknya pelaku UMKM tidak akan mengetahui secara persis berapa pendapatan (kas) yang diterimanya, berapa biaya operasi yang harus dikeluarkannya dan berapakah yang seharusnya masih tersisa. Namun apabila UMKM menyusun laporan keuangan, ada banyak manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan modal pemilik di masa lalu.
2. Menjadi salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Data dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
3. Mengetahui nilai perubahan kas dan distribusinya. Berdasarkan laporan arus kas, pelaku UMKM akan mengetahui berapa nilai kenaikan ataupun penurunan kas dalam 1 periode. Selain dari pada itu pelaku UMKM pun dapat mengetahui

darimana sajakah sumber kas berasal, akan dikeluarkan ke mana saja pengalokasiannya dan berapakah jumlah penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang berasal dari kegiatan operasi, investasi maupun yang berasal dari pendanaan.

Dengan adanya penyusunan laporan keuangan maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun akan ada data-data atau laporannya secara detail, hal ini akan membuat kemudahan sebuah UMKM untuk beroperasi secara baik dan efisien, serta UMKM tersebut pun akan dapat menganalisis kekurangan-kekurangan untuk menjadi sebuah lebih baik lagi kedepannya.

SAK ETAP merupakan standar yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009. Standar ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2011 dan digunakan oleh perusahaan yang kepemilikan modalnya tidak diperdagangkan di pasar modal, termasuk dalam hal ini UMKM. Dengan adanya SAK ETAP ini, sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk menyalurkan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Seiring dengan berlakunya PP nomor 46 tahun 2013 yang menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan objek pajak, maka setiap usaha kecil diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa usaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar rupiah dalam satu tahun **wajib** melaksanakan kewajiban perpajakannya mengacu kepada PP ini. Selama ini banyak UMKM tidak dapat melakukan kewajiban perpajakan, penyebabnya adalah para pengelola UMKM tidak mengetahui cara perhitungan pajak dan juga tidak memiliki laporan keuangan yang merupakan sumber data untuk menghitung pajak.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keberadaan dan pentingnya akuntansi harus dipahami oleh pengusaha UMKM secara praktis tanpa harus mempelajari ilmu akuntansi. Hal ini disebabkan karena dengan adanya laporan keuangan sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi akuntansi, para pelaku usaha dapat mengetahui bagaimana posisi serta kinerja keuangannya. Tidak hanya itu, pelaku usaha akan lebih mudah untuk menghitung pajak.

Permasalahan Mitra

Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh UMKM berkaitan dengan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan modal
2. Kurang memahami tentang perlunya pencatatan.
3. Kurang paham tentang prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan & analisisnya.
4. Kurang akurat perencanaan anggaran kas.

5. Tidak memiliki catatan harga pokok produksi
6. Terbatasnya sumber dana dari perbankan.
7. Kemampuan memperoleh pinjaman bank relatif rendah/kurang mampu menyediakan jaminan, proposal bisnis dan lain-lain.
8. Tidak mampu menghitung pajak karena tidak mampu membuat laporan keuangan sebagai sumber data penghitungan pajak.

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan keterampilan pembukuan dan akuntansi yang mudah aplikasinya guna membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP 2011. Permasalahan lain yang dihadapi para pelaku UMKM adalah tidak mengetahui cara melaksanakan pembayaran pajak dan dampaknya adalah negara tidak menerima pendapatan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian. Pengembangan UMKM ini perlu dilakukan, mengingat sektor ini memiliki potensi dalam perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

Semua UMKM melalui PP nomor 46 Tahun 2013 diwajibkan untuk membayar dan melaksanakan kewajiban administrasi pajak, namun disisi lain lemahnya pengetahuan perpajakan terkait dengan transaksi bisnis UMKM menyebabkan UMKM tersebut tidak melaksanakan kewajibannya kepada Negara. Pelaku UMKM tidak mengetahui cara

melaksanakan pembayaran pajak dan dampaknya adalah negara tidak menerima pendapatan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian

2. METODE

Untuk mempermudah UMKM dalam membuat laporan keuangan, sangat dibutuhkan keterampilan pembukuan dan akuntansi yang mudah aplikasinya guna membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP 2011 dan dapat melaksanakan pembayaran pajak.

Pelatihan membuat Laporan Keuangan dan Perhitungan Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis SAK ETAP dan PP Nomor 46 tahun 2013 dimulai dari mengidentifikasi proses bisnis dari UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi siklus akuntansi perusahaan jasa mulai dari transaksi sampai laporan keuangan. Setelah dilakukan proses pengidentifikasian siklus akuntansi, selanjutnya dilakukan perhitungan kewajiban pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 bagi UMKM.

Tabel 2.1
Solusi dan Target Luaran

No	Solusi	Target Luaran
1.	Perancangan laporan keuangan dan perhitungan pajak bagi UMKM berbasis SAK ETAP dan PP 46 tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • UMKM mampu mengidentifikasi Siklus akuntansi • UMKM mampu membuat pelaporan keuangan dan perpajakan • UMKM dapat menghitung pajak penghasilannya sendiri

		<p>dan melaksanakan kewajiban perpajakan kepada Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UMKM mampu meningkatkan keandalan kinerja perusahaan untuk memperoleh bantuan pembiayaan dari investor maupun kreditor
--	--	--

Kegiatan ini dapat menjadi embrio awal pengembangan kegiatan berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan penerapan sitem akuntansi dan perpajakan berbasis SAK ETAP dan PP 46 tahun 2013 di UMKM binaan ini dapat dikembangkan ke UMKM lainnya yang juga masih mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan dan perhitungan pajak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai sarana menjawab permasalahan umum yang terjadi di UMKM terkait dengan kewajiban keuangan.

Untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka beberapa metode pendekatan digunakan dalam program ini adalah:

Tabel 2.2.
Metode pelaksanaan

Rencana Kegiatan	Metode	Partisipasi Mitra
Pelatihan pembuatan laporan keuangan dan perhitungan pajak	Pada kegiatan ini diberikan pelatihan kepada pengelola UMKM dalam membuat laporan keuangan dan perhitungan pajak	Pengelola UMKM mengikuti pelatihan membuat laporan keuangan dan perhitungan pajak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan keterampilan pembukuan dan akuntansi yang mudah aplikasinya guna membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP 2011. Dengan adanya penyusunan laporan keuangan maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan ada data-data atau laporannya secara detail, hal ini akan membuat kemudahan sebuah UMKM untuk beroperasi secara baik dan efisien, serta UMKM tersebut pun akan dapat menganalisis kekurangan-kekurangan untuk menjadi sebuah lebih baik lagi kedepannya.

Selama ini banyak UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang merupakan sumber data untuk menghitung pajak sehingga pelaku UMKM tidak dapat melakukan kewajiban perpajakan. Semua UMKM melalui PP nomor 46 Tahun 2013 diwajibkan untuk membayar dan melaksanakan kewajiban administrasi pajak, namun disisi lain lemahnya pengetahuan perpajakan terkait dengan transaksi bisnis UMKM menyebabkan UMKM tersebut tidak melaksanakan kewajibannya kepada Negara. Pelaku UMKM tidak mengetahui cara melaksanakan pembayaran pajak dan dampaknya adalah negara tidak menerima pendapatan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian.

Pada kegiatan ini peserta diberikan terlebih dahulu materi gambaran umum tentang laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP 2011 dan kewajiban perpajakan menurut PP nomor 46 tahun 2013. SAK ETAP merupakan standar yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009. Standar ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2011 dan digunakan oleh perusahaan yang kepemilikan modalnya tidak diperdagangkan di pasar modal, termasuk dalam hal ini UMKM. Dengan adanya SAK ETAP ini, sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk menyalurkan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM

Selanjutnya, peserta diberikan pelatihan membuat laporan keuangan dan perhitungan pajak. Proses kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Interaksi diantara peserta merupakan dasar untuk memperoleh informasi. Peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberikan pernyataan, menanggapi, komentar maupun mengajukan pertanyaan. Diharapkan pelaku UMKM mampu mengidentifikasi siklus akuntansi, mampu membuat pelaporan keuangan dan perpajakan, dapat menghitung pajak penghasilannya sendiri dan melaksanakan kewajiban perpajakan kepada

Negara, mampu meningkatkan keandalan kinerja perusahaan untuk memperoleh bantuan pembiayaan dari investor maupun kreditor.

4. KESIMPULAN dan SARAN

Untuk mempermudah UMKM dalam membuat laporan keuangan, sangat dibutuhkan keterampilan pembukuan dan akuntansi yang mudah aplikasinya guna membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP 2011 dan dapat melaksanakan pembayaran pajak.

Kegiatan ini dapat menjadi embrio awal pengembangan kegiatan berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan penerapan sistem akuntansi dan perpajakan berbasis SAK ETAP dan PP 46 tahun 2013 di UMKM binaan ini dapat dikembangkan ke UMKM lainnya yang juga masih mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan dan perhitungan pajak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai sarana menjawab permasalahan umum yang terjadi di UMKM terkait dengan kewajiban keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Ediraras, Dharma T. Akuntansi dan Kinerja UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2, Volume 15, Agustus 2010. Universitas Gunadarma.

Herawati, Trisna, dkk. 2010. *Pelatihan Penyusunan Laporan Laba Rugi (Income Statement) pada*

Perusahaan Jasa Salon dan Spa di Kota Singaraja. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat. Universitas Pendidikan Ganesha.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Diunduh pada <http://www.iaiglobal.or.id/> tanggal 20 April 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pinasti, M. 2007. *Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Suatu Riset Eksperiman.*

Riyanto, Rum. 2011. Keberadaan Pajak UMKM bagi Pembangunan Indonesia.